



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : PPAK endus 51 ribu ASN main judi online
Tanggal : Sabtu, 01 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1

PPATK Endus 51 Ribu ASN Main Judi Online

Hasil deteksi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut sebanyak 51.611 kalangan Aparatur Sipil Negara atau ASN di tingkat pusat dan daerah menjadi pemain judi online alias judol, membuat heboh.

Jumlah itu bagian dari data jumlah pemain judol yang telah terekam sebanyak 9,78 juta orang pada 2024, dengan total deposit Rp 51,3 triliun. Jumlah pemain judol itu mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023

sebanyak 3,79 juta orang. Ironisnya, sekitar 51.611 pemain judi online diidentifikasi berasal dari ASN, baik di Pemerintah Pusat maupun daerah," kata Deputy Analisis dan Pemeriksaan PPAK, Danang Tri Hartono, Kamis (30/10/2025).

Dijelaskannya, data pelaku judol yang didapat PPAK ini merupakan bagian dari Operasi Lebah Madu yang tengah digagas PPAK. Operasi Lebah Madu digelar dalam rangka memperkuat sistem pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana korupsi, judi online, dan meningkatkan penerimaan negara.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan, permasalahan judi online di kalangan ASN ini sebagai sebuah musibah. Tetapi, kata dia, ada faktor lain yang membuat hal ini terjadi, seperti ketidakmampuan dalam mengatur uang.

"Secara pendidikan, mereka sudah lulus 51, tapi dalam

menelola uang, mereka belum paham apa-apa," ujar Mardani kepada Rakyat Merdeka, Jumat (31/10/2025).

Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha menilai, persoalan bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan sebagai indikator lemahnya literasi digital, kontrol diri, serta rapuhnya pengawasan internal.

Menurut dia, keterlibatan ASN dalam judol memperlihatkan adanya kekosongan nilai dan tekanan psikologis dalam sistem

birokrasi.

"Penyelesaian persoalan ini tidak cukup dengan sanksi administratif, tetapi juga membutuhkan pembinaan mental, literasi digital, dan penguatan etika profesi berbasis integritas digital," ujar Pratama kepada Rakyat Merdeka, Jumat (31/10/2025).

Untuk mengetahui lebih dalam pandangan Mardani Ali Sera dan Pratama Persadha mengenai hasil temuan PPAK bahwa puluhan ribu ASN terjerat judi online, berikut wawancaranya.

MARDANI ALI SERA,
Anggota Komisi II DPR

Literasi Keuangan ASN Masih Rendah



Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendeteksi fenomena ASN main judol. Apa pandangan Anda?

Pertama, ini musibah. Kedua, ini menunjukkan kualitas pendidikan, khususnya literasi keuangan masih bermasalah. Bisa jadi seseorang sudah lulus SI, tapi dalam hal mengelola uang dia belum paham apa-apa. Uang itu bukan sekedar angka, tapi juga soal psikologi manusia. Ada buku *The Psychology of Money* yang menjelaskan bagaimana uang bisa membuat orang serakah, ceroboh, atau kehilangan kendali. Kalau literasi keuangan lemah, siapa pun, bukan hanya kalangan bawah, tapi juga menengah dan atas, bisa jadi korban.

Para pelaku ini kan sudah jadi ASN. Apa langkah yang sebaiknya dilakukan Pemerintah?

Kalau ikut teori *supply and demand*, sekarang supply pemain tinggi, demand-nya juga besar. Saya pernah ke Kamboja, dulu sebelum Covid-19, banyak ada sekitar 3.000 orang Indonesia di sana, sekarang 130 ribu. Mayoritasnya pekerja judi online karena di sana masih legal. Bahkan banyak juga dari China, Malaysia, dan Thailand. Artinya, pelaku ini sudah agresif. Mereka mengiming-imingi, bahkan membungkus judi dalam bentuk *game* agar menarik dan ketagihan. Karena itu, perlu penegakan hukum yang kuat di sisi demand-nya. Judi di Indonesia itu kriminal, jadi ASN harus diingatkan risikonya. Sosialisasi dan edukasi dijalankan, baru sanksi ditegakkan.

Penindakan hukum saja tidak cukup?

Betul. Sepandapat-pandainya polisi, maling lebih pandai. Pelaku judi online ini juga begitu. Mereka bermetamorfosis, kadang memakai *influencer* yang tidak tahu apa-apa, atau membuat *landing page* palsu. Karena itu, petugas siber kita harus lebih cerdas. Selain itu, edukasi masyarakat juga penting, baik ASN, kelas menengah, maupun penerima bantuan sosial. Kemarin saya dapat data dari PPAK, ada puluhan ribu rekening penerima bantuan sosial yang terjerat bermain judi online. Sudah miskin, main judi lagi, kasihan. Jadi mereka korban. Kalau langsung dihukum, jatuh miskin, efek sosialnya makin berat: kriminalitas naik, perceraian meningkat, negara rugi.

Apakah ada solusi lain untuk mencegah maupun mengurangi judi online ini?

RT dan RW bisa menjadi garda terdepan dalam deteksi dini. Mereka tahu siapa di lingkungannya yang terlibat atau mulai terpengaruh. Jadi pemberantasan harus menyeluruh,

“Judi di Indonesia itu kriminal, jadi ASN harus diingatkan risikonya. Sosialisasi dan edukasi dijalankan, baru sanksi ditegakkan.”

PRATAMA PERSADHA,
Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC

Sebagai ASN Main Judol Karena Stres



“Negara perlu menanamkan kesadaran bahwa setiap jejak digital ASN adalah representasi kepercayaan publik terhadap aparatur negara.”

Bagaimana Anda melihat keterlibatan ASN dalam praktik judi online?

Ini bukan hanya menoreng etika pelayanan publik, tetapi juga menandai adanya krisis digital dan sosial yang lebih dalam. Judi online di Indonesia, telah berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang paling sulit dicegah karena bersinggungan dengan berbagai aspek. Mulai dari teknologi finansial, rekayasa sosial, lemahnya literasi digital, hingga celah pengawasan dan penegakan hukum. Untuk memahami akar persoalannya, perlu dilihat dari dua sisi.

Apa saja itu?

Upaya negara dalam menghapuskan praktik ini, dan mengapa ASN justru menjadi bagian dari masalah yang seharusnya mereka bantu tangani. Negara sebenarnya memiliki berbagai instrumen untuk mengurusi bahkan menghilangkan praktik judi online, namun efektivitasnya sangat tergantung pada konsistensi dan koordinasi antar lembaga.

Langkah konkretnya seperti apa?

Pendekatan teknis seperti pemblokiran situs dan aplikasi judi online oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) adalah langkah pertama yang bersifat preventif. Namun tidak pernah cukup, karena yang selama ini dilakukan adalah

pemblokiran dari *landing page* situs judi online, yang hanya menampilkan informasi tentang nomor rekening untuk melakukan deposit atau *withdrawal*. Serta nomor kontak *customer service* bukan server permainan judi online tersebut, padahal seharusnya server yang dipergunakan untuk permainan judi online yang seharusnya diblokir oleh Komdigi.

Langkah lainnya seperti apa?

Selama sistem keuangan digital masih memungkinkan transaksi anonim atau lintas batas hanya melalui mekanisme verifikasi yang kuat, praktik judi online akan terus menemukan celah untuk hidup kembali. Negara perlu membangun ekosistem digital yang lebih resilien.

Maksudnya bagaimana?

Ya misalnya dengan memperkuat integrasi antara Kementerian Komdigi, PPAK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kepolisian, sehingga deteksi aktivitas keuangan mencurigakan dapat dilakukan secara *real time*. Penguatan kerja sama internasional juga penting karena sebagian besar server judi online berada di luar negeri, terutama di kawasan yang sulit dijangkau oleh hukum nasional seperti Kamboja, Filipina, dan beberapa yurisdiksi bebas pajak di Eropa Timur. Namun, di luar pendekatan teknis, negara juga

harus melakukan masalah judi online sebagai krisis sosial.

Karena ini disebut krisis sosial? ASN yang terlibat tidak semata karena dorongan ekonomi, tetapi karena kekosongan nilai dan tekanan psikologis dalam sistem birokrasi yang kerap memunculkan rasa puas dan makna kerja. Bagi sebagian ASN, judi online menjadi bentuk pelarian dari rutinitas, stres, dan kurangnya penghargaan atas kinerja. Aspek ini menunjukkan, bahwa kebijakan pencegahan tidak cukup hanya melalui sanksi administratif, melainkan juga melalui pembinaan mental, literasi digital, dan penguatan etika profesi berbasis integritas digital. Negara perlu menanamkan kesadaran bahwa setiap jejak digital ASN adalah representasi kepercayaan publik terhadap aparatur negara.

Namun kenapa judol ini masih menjadi daya tarik masyarakat? Daya tarik judi online bagi masyarakat, termasuk ASN, terletak pada sifatnya yang instan, gamified, dan mengandung ilusi kontrol. Platform judi online dirancang menggunakan prinsip desain aktif yang sama dengan media sosial. Yakni menciptakan siklus *doopamin* cepat melalui kemenangan kecil yang diatur secara algoritmik. ■■■